

TESIS

**PENGARUH TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS DAN
PARTISIPASI ANGGARAN TERHADAP PENGELOLAAN
KEUANGAN DENGAN GAYA KEPEMIMPINAN
SEBAGAI VARIABEL MODERASI**

***THE EFFECT OF TRANSPARENCY, ACCOUNTABILITY AND
BUDGET PARTICIPATION ON FINANCIAL MANAGEMENT
WITH LEADERSHIP STYLE AS A MODERATING VARIABLE***

LYDIA GLORIA TA'BI

A062212018



Kepada

**PROGRAM MAGISTER AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2025**



TESIS

PENGARUH TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS DAN PARTISIPASI ANGGARAN TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN DENGAN GAYA KEPEMIMPINAN SEBAGAI VARIABEL MODERASI

THE EFFECT OF TRANSPARENCY, ACCOUNTABILITY AND BUDGET PARTICIPATION ON FINANCIAL MANAGEMENT WITH LEADERSHIP STYLE AS A MODERATING VARIABLE

Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar magister

disusun dan diajukan oleh

LYDIA GLORIA TA'BI

A062212018



kepada

**PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2025**



LEMBAR PENGESAHAN TESIS

PENGARUH TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DENGAN GAYA KEPEMIMPINAN SEBAGAI VARIABEL MODERASI

Disusun dan diajukan oleh

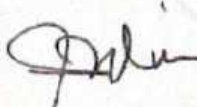
LYDIA GLORIA TA'BI
A062212018

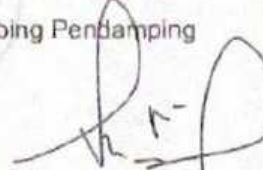
Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Magister **Akuntansi** Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin
Pada tanggal 13 Juni 2025
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama

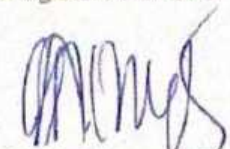
Pembimbing Pendamping


Dr. Syarifuddin Rasyid, SE., M.Si., Ak., ACPA
NIP. 196503071994031003


Dr. Sri Sundari, SE., Ak., M.Si., CA
NIP. 196602201994122001

Ketua Program Studi
Magister Akuntansi

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin


Prof. Dr. Hj. Aini Indriyawati, SE., Ak., M.Si., CA
NIP. 196811251994122002


Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, SE., M.Si.
NIP. 196402051988101001



PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama Lydia Glona Ta'bi

NIM A062212018

Jurusan/Program Studi Magister Akuntansi

menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa tesis yang berjudul

Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas Dan Partisipasi Anggaran Terhadap
Pengelolaan Keuangan Dengan Gaya Kepemimpinan
Sebagai Variabel Moderasi

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan/ditulis/ diterbitkan sebelumnya, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 20 Juni 2025

Yang membuat pernyataan,

Handwritten signature and stamp: **METERAI TEMPEL**
BAMC383135410

Lydia Gloria Ta'bi

NIM A062212018



PRAKATA

Segala Puji Syukur peneliti panjatkan kepada Tuhan Yesus sang pemilik hidup ini atas segala perkenaan-Nya dan kasih-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul “Pengaruh *Good Governance* dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan *Fraud* dengan Budaya Organisasi Sebagai Variabel Moderasi Pada Pemerintah Desa”, sebagai tugas akhir untuk memperoleh gelar Magister Akuntansi (M.Ak.) pada program Strata Dua (S-2) Program Studi Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

Proses penyusunan tesis ini dilandasi dengan penuh kesungguhan dan kesabaran serta bantuan dari berbagai pihak sehingga tesis ini dapat terselesaikan pada waktu yang tepat. Oleh karena itu pada kesempatan ini peneliti ingin berterima kasih atas segala bantuan dan doanya kepada:

1. Kedua orang tua Bapak dan Ibu Pakidin dan Irena, yang telah memberikan dukungan dan motivasi yang tiada henti kepada peneliti. Terima kasih kepada Capt. Luther Ta'bi, M.Mar dan Ibunda Maria yang selalu mendoakan peneliti. Semoga peneliti dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik.
2. Bapak Kadir, M.Si. selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
3. Ibu Prof. Dr. Aini Indrijawati, S.E., M.Si., Ak., CA. selaku Ketua Program Studi Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
4. Bapak Dr. Syarifuddin Rasyid, SE.,M.Si.,ACPA selaku Pembimbing I dan Ibu Dr. Sri Sundari, SE., Ak., M.Si selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya memberikan bimbingan hingga tesis ini dapat terselesaikan. Terima kasih atas kesediaannya berbagi pengetahuan yang sangat berharga.
5. Ibu Prof. Dr. Haliah, SE., Ak., M.Si., CA, Ibu Prof. Dr. Indrijawati, SE., Ak., M.Si., CA, dan Ibu Dr. Rahmawati HS, SE.,Ak., M.Si., CA, selaku tim penguji peneliti, terima kasih atas waktu, kesempatan, dan pengetahuan yang telah diberikan.
6. Pegawai Akademik Prodi Magister Akuntansi, Kemahasiswaan, dan Perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makassar. Terima kasih atas segala bantuannya.
7. Teman seperjuangan Lyliana, Terima kasih atas supportnya sampai hari ini.
8. Semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu, yang dengan tulus memberikan semangat dan doa sehingga tesis ini dapat terselesaikan. Terima kasih atas segala doa dan bantuannya.

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat peneliti harapkan demi perbaikan kedepannya.



ABSTRAK

Lidya Gloria Ta'bi. Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas Dan Partisipasi Anggaran Terhadap Pengelolaan Keuangan Dengan Gaya Kepemimpinan Sebagai Variabel Moderasi. (dibimbing oleh Syarifuddin Rasyid dan Sri Sundari).

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi anggaran terhadap pengelolaan keuangan dengan gaya kepemimpinan sebagai variabel moderasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan kuesioner sebagai instrumen pengumpulan data. Sampel penelitian ini adalah 45 ASN yang bekerja di pemerintahan daerah di Kota Makassar, Kabupaten Bulukumba, dan Kabupaten Tanah Toraja. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik Moderated Regression Analysis (MRA) dengan bantuan software SPSS versi 26. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi anggaran berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, gaya kepemimpinan juga terbukti memperkuat pengaruh transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi anggaran terhadap pengelolaan keuangan daerah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.

Kata Kunci: Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Anggaran, Pengelolaan Keuangan, Gaya Kepemimpinan.



ABSTRACT

Lidya Gloria Ta'bi. The Effect of Transparency, Accountability and Budget Participation on Financial Management with Leadership Style as a Moderating Variable. (supervised by Syarifuddin Rasyid and Sri Sundari).

This research aims to examine the effect of transparency, accountability and budget participation on financial management with leadership style as a moderating variable. This research uses a quantitative approach using a questionnaire as a data collection instrument. The sample for this research was 45 ASN who worked in regional government in Makassar City, Bulukumba Regency and Tanah Toraja Regency. The collected data was then analyzed using the Moderated Regression Analysis (MRA) technique with the help of SPSS version 26 software. The research results show that transparency, accountability and budget participation have a positive effect on regional financial management. Apart from that, leadership style has also been proven to strengthen the influence of transparency, accountability and budget participation on regional financial management. It is hoped that the results of this research will provide insight for local governments in their efforts to improve the quality of regional financial management.

Keywords: Transparency, Accountability, Budget Participation, Financial Management, Leadership Style.



DAFTAR ISI

SAMPUL TESIS.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN	iv
PRAKATA	v
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Kegunaan Penelitian	8
1.5 Ruang Lingkup Penelitian	9
1.6 Sistematika Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Tinjauan Teori dan Konsep.....	11
2.2 Tinjauan Empiris	18
BAB III KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS	21
3.1 Kerangka Konseptual.....	21
3.2 Pengembangan Hipotesis.....	23
BAB IV METODE PENELITIAN.....	30
4.1 Rancangan Penelitian	30
4.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	30
4.3 Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel	31
4.4 Jenis dan Sumber Data.....	31
4.5 Metode Pengumpulan Data	32



4.6	Variabel Penelitian dan Definsi Operasional	32
4.8	Teknik Analisis Data.....	35
BAB V HASIL PENELITIAN		41
5.1	Deskripsi Data	41
5.2	Analisis Statistik Deskriptif Variabel Penelitian	44
5.3	Teknik Analisis Data.....	50
5.5	Analisis Regresi	56
5.6	Uji Hipotesis	60
BAB VI PEMBAHASAN		63
6.1	Pengaruh Transparansi Terhadap Pengelolaan Keuangan	64
6.2	Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan	64
6.3	Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Pengelolaan Keuangan	65
6.4	Gaya Kepemimpinan Memperkuat Pengaruh Transparansi terhadap Pengelolaan Keuangan	66
6.5	Gaya Kepemimpinan Memperkuat Pengaruh Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Keuangan	67
6.6	Gaya Kepemimpinan Memperkuat Pengaruh Partisipasi Anggaran terhadap Pengelolaan Keuangan	67
BAB VII PENUTUP		69
7.1	Kesimpulan	69
7.2	Implikasi.....	70
7.3	Keterbatasan	71
7.4	Saran Penelitian	71
DAFTAR PUSTAKA		73



DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu	18
Tabel 4. 1 Variabel Penelitian dan Definisi Oprasional.....	33
Tabel 4. 2 Skala Likert	35
Tabel 5. 1 Karakteristik Responden Berdasarkan Data	42
Tabel 5. 2 Karakteristik Repobdeb Berdasarkan Jenis Kelamin	42
Tabel 5. 3 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan	43
Tabel 5. 4 Statistik Deskriptif Variabel	44
Tabel 5. 5 Hasil Rekapitulasi Variabel Transparansi	46
Tabel 5. 6 Hasil Rekapitulasi Variabel Akuntabilitas	47
Tabel 5. 7 Hasil Rekapitulasi Variabel Partisipasi Anggaran	48
Tabel 5. 8 Hasil Rekapitulasi Variabel Gaya Kepemimpinan	49
Tabel 5. 9 Hasil Rekapitulasi Variabel Pengelolaan Keuangan	50
Tabel 5. 10 Hasil Uji Validitas	51
Tabel 5. 11 Uji Reabilitas.....	53
Tabel 5. 12 Hasil Uji Normalitas	54
Tabel 5. 13 Hasil Uji Multikolinearitas	55
Tabel 5. 14 Koefisien Determinasi Sebelum Interaksi	56
Tabel 5. 15 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda.....	57
Tabel 5. 16 Uji Analisis Regresi Linear Setelah Berinteraksi Dengan Variabel Moderasi ..	58
Tabel 5. 17 Hasil Analisis Regresi Moderasi	59
Tabel 6. 1 Ringkasan Hasil Penelitian	63



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Kerangka Konseptual	22
Gambar 5. 1 Hasil Uji Normalitas P-Plot.....	54
Gambar 5. 2 Hasil Uji Heteroskedasitas-Scatterplot.....	55



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu hal yang penting dalam administrasi pemerintahan yang bertujuan untuk mengatur dan memanfaatkan sumber daya keuangan secara efektif, efisien, dan bertanggung jawab. Dengan adanya otonomi daerah, setiap pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengelola anggarannya secara mandiri. Dalam konteks pengelolaan keuangan, otonomi daerah memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah untuk merancang, mengelola dan mempertanggungjawabkan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) secara mandiri. Pemerintah daerah juga diberikan kewenangan untuk mengelola pendapatan asli daerah (PAD) sebagai sumber pembangunan, yang diharapkan mampu meningkatkan kemandirian fiskal daerah (Br. Tobing *et al.*, 2023).

Pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah wajib dilaksanakan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan ini secara detail mengatur tata cara pengelolaan keuangan daerah dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, penerapan prinsip-prinsip good corporate governance dalam pengelolaan keuangan daerah sangat penting untuk memastikan bahwa keuangan daerah dikelola secara



efisien. Prinsip *Good Corporate Governance* yang perlu diterapkan dalam pengelolaan keuangan daerah antara lain adalah, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi (Pondaag *et al.*, 2024).

Salah satu cara untuk mengetahui apakah pengelolaan keuangan daerah telah dilakukan dengan baik dan sesuai dengan regulasi adalah dengan melihat opini yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan oleh BPK menjadi acuan bahwa pengelolaan keuangan daerah telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan regulasi. Dilansir dari laman BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan menyebutkan bahwa Kota Makassar berhasil mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Makassar 2023 (<https://sulsel.bpk.go.id>). Opini WTP yang diberikan oleh BPK bukan hanya sekedar predikat, tetapi merupakan hasil dari pemeriksaan menyeluruh terhadap laporan keuangan pemerintah daerah.

Meskipun memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Pejabat Sementara (PJS) Walikota Makassar yaitu Andi Arwin Aziz menyoroti pentingnya pengelolaan keuangan, khususnya terkait serapan anggaran. Hal ini dikarenakan serapan anggaran di Pemerintah Kota Makassar belum optimal. Dilansir dari laman SmartCity Makassar menyebutkan bahwa serapan anggaran Pemerintah Kota Makassar  % dan 50%, bahkan ada yang dibawah 50% (<https://smc>

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Bulukumba juga meraih opini WTP atas Laporan Keuangan Tahun anggaran 2023 (<https://sulselprov.go.id/>). Predikat opini WTP ini adalah yang kesebelas kalinya diterima Pemkab Bulukumba. Namun, meski mendapat WTP masih terdapat beberapa item yang mesti ditindak lanjuti, diantaranya terkait dengan kesalahan penganggaran belanja daerah, pendataan dan penetapan pajak daerah, pencatatan dan pelaporan aset tetap yang belum memadai karena belum didukung bukti kepemilikan. Sementara itu, Kabupaten Tanah Toraja mendapat opini WTP untuk pertama kalinya. Hal ini dikarenakan pencatatan

mengenai aset berupa tanah, kemudian bangunan dan inventaris lainnya tidak didukung dengan bukti yang sesuai aturan (<https://medianta.news/>).

Kendala-kendala yang masih terjadi dalam pengelolaan keuangan daerah seperti belum optimalnya daya serap anggaran, kesalahan penganggaran belanja daerah, pendataan dan penetapan pajak daerah, pencataan dan pelaporan aset tetap yang belum memadai karena belum didukung bukti kepemilikan menyiratkan bahwa dalam pengelolaan keuangan daerah masih perlu perbaikan dan perlunya penguatan prinsip-prinsip *good governance*, khususnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam praktik pengelolaan keuangan daerah (Alim & Djasuli, 2024).

Transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah merupakan cerminan dari pemerintahan yang bersih dan akuntabel. (Nurrizkiana *et al.*, 2017 ; Darwis *et al.*, 2022) transparansi berarti bahwa informasi yang berkaitan dengan organisasi tersedia secara mudah dan bebas serta bisa diakses oleh mereka yang terkena dampak kebijakan yang dilakukan oleh organisasi tersebut. Transparansi adalah keterbukaan informasi yang menandakan komitmen pemerintah dalam melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik sehingga menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel. (Muti'ah *et al.*, 2024) Transparansi mendorong pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerah dengan efisien dan efektif, karena setiap pengeluaran harus dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Selain itu, pengelolaan keuangan yang dilakukan secara transparan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah, karena masyarakat merasa bahwa pengelolaan keuangan dilakukan secara terbuka dan adil. Studi yang dilakukan oleh (Veronica *et al.*, 2024 ; Suryana & Akla, 2020) menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan. Namun, studi yang dilakukan oleh



(Yesbrianus *et al.*, 2024) menunjukkan bahwa transparansi tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan.

Selain transparansi, dalam prinsip *Good Corporate Governance* terdapat akuntabilitas. berpendapat bahwa akuntabilitas berarti pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan. Akuntabilitas sangat penting dalam ruang lingkup organisasi, karena suatu organisasi dikatakan akuntabel jika memiliki kemampuan untuk menjelaskan kondisi yang dialami termasuk didalamnya keputusan yang diambil dan berbagai aktivitas yang dilakukan (Garung & Ga, 2020). Dalam pengelolaan keuangan daerah akuntabilitas juga sangat penting untuk memastikan bahwa keuangan daerah digunakan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah juga dapat mencegah terjadinya korupsi karena setiap tindakan dapat dipertanggungjawabkan. Studi yang dilakukan oleh (Edowati *et al.*, 2021; Anggriani *et al.*, 2019; Halisa, 2023), menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan. Namun, studi yang dilakukan (Putri *et al.*, 2024) menunjukkan bahwa akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan.

Prinsip selain transparansi dan akuntabilitas dalam mewujudkan good corporate governance adalah partisipasi. Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, jika transparansi memastikan informasi terbuka dan akuntabilitas menjamin pertanggungjawaban, maka partisipasi memberi ruang bagi seluruh pemangku kepentingan untuk terlibat aktif dalam proses pengambilan keputusan. Bentuk partisipasi dalam pengelolaan keuangan daerah yaitu partisipasi dalam penganggaran. Partisipasi anggaran adalah suatu metode pendekatan dalam penyusunan anggaran dengan melibatkan atasan dan bawahan. (Ismawati *et al.*, 2022) Sistem anggaran partisipatif memberi tanggungjawab di level yang rendah ke level pertanggungjawaban yang lebih



tinggi. Setiap individu yang terlibat dalam suatu kegiatan dan memiliki kompetensi terkait anggaran diwajibkan untuk menyusun rencana anggaran untuk diserahkan pada tingkatan manajemen yang lebih tinggi. Wujud nyata partisipasi adalah kegiatan yang mengikutsertakan individu yang memiliki pengaruh dan kemampuan dalam proses penyusunan anggaran. Partisipasi yang dilakukan akan diapresiasi atas dasar pencapaian tujuan anggaran (Lilis & Cecep, 2020). Studi yang dilakukan (Sari *et al.*, 2020) menunjukkan bahwa partisipasi anggaran berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan. Namun, Studi yang dilakukan oleh (Achmad & Misnaini, 2021) menunjukan bahwa partisipasi tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan.

Gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh seorang kepala daerah akan menentukan sejauh mana prinsip-prinsip *good corporate governance*, seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi, dapat terwujud dalam pengelolaan keuangan daerah. Busro (Arina Pratiwi & Budiarta, 2018) menjelaskan bahwa gaya kepemimpinan adalah suatu pola perilaku yang secara konsisten diperankan oleh pemimpin ketika mempengaruhi anggota kelompok. Sebagai pemegang otoritas tertinggi, pemimpin bukan sekedar dapat mempengaruhi pemanfaatan semua sumber daya yang tersedia untuk implementasi kebijakan, tapi jauh melampaui itu juga mempunyai power yang dapat digunakan untuk memaksa sumber daya yang lain. Studi yang dilakukan oleh (Putra & Zefanya, 2023) menunjukan bahwa gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Namun, studi yang dilakukan oleh (Iswahyudi *et al.*, 2017) menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan tidak berpengaruh terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Studi yang dilakukan (Irfan *et al.*, 2020) mengatakan bahwa gaya kepemimpinan dapat mempengaruhi hubungan antara akuntabilitas dengan kualitas anggaran. Dalam ini gaya kepemimpinan menjadi variabel moderasi.



Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Halisa *et al.*, (2023). Dalam penelitian ini penulis menambahkan gaya kepemimpinan sebagai variabel moderasi, hal ini didasari oleh keyakinan bahwa gaya kepemimpinan seorang pemimpin memiliki peran yang sangat krusial dalam mempengaruhi efektivitas penerapan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi anggaran dalam pengelolaan keuangan. Seorang pemimpin dengan gaya kepemimpinan yang tepat dapat menciptakan lingkungan kerja yang kondusif bagi penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam pengelolaan keuangan. Pemimpin yang tegas dalam menegakkan aturan akan mendorong pegawai dan aparatur negara untuk lebih bertanggung jawab dalam penggunaan dana publik, yang pada akhirnya akan meningkatkan akuntabilitas dan kualitas pengelolaan keuangan daerah (Arina & Budiarta, 2018). Selain itu, gaya kepemimpinan yang terbuka dan mendukung keterlibatan seluruh pihak dalam pengambilan keputusan memungkinkan informasi yang lebih jelas dan terbuka diakses oleh publik, sehingga mendorong transparansi dalam pengelolaan keuangan. Tanpa dukungan dari pemimpin, transparansi mungkin terjadi secara formal tanpa diikuti tindakan nyata (Putri *et al.*, 2024).

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi Terhadap Pengelolaan Keuangan Dengan Gaya Kepemimpinan sebagai Variabel Moderasi Pada Pemerintah Daerah”**.

1.2 Rumusan Masalah



dasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya maka rumusan dalam penelitian ini sebagai berikut.

1. Apakah transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan di Pemerintah Daerah ?
2. Apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan di Pemerintah Daerah ?
3. Apakah partisipasi anggaran berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan di Pemerintah Daerah ?
4. Apakah gaya kepemimpinan memoderasi pengaruh transparansi terhadap pengelolaan keuangan di Pemerintah Daerah ?
5. Apakah gaya kepemimpinan memoderasi pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan di Pemerintah Daerah ?
6. Apakah gaya kepemimpinan memoderasi pengaruh partisipasi anggaran terhadap pengelolaan keuangan di Pemerintah Daerah ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menguji dan menganalisis:

1. Pengaruh transparansi terhadap pengelolaan keuangan terhadap pengelolaan keuangan di Pemerintah Daerah.
2. Pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan terhadap pengelolaan keuangan di Pemerintah Daerah.
3. Pengaruh partisipasi anggaran terhadap pengelolaan keuangan terhadap pengelolaan keuangan di Kantor Pemerintah Daerah.
4. Gaya kepemimpinan memoderasi pengaruh transparansi terhadap pengelolaan keuangan di Pemerintah Daerah.



5. Gaya kepemimpinan memoderasi pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan di Pemerintah Daerah.
6. Gaya kepemimpinan memoderasi pengaruh partisipasi anggaran terhadap pengelolaan keuangan di Pemerintah Daerah.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara teoritis dan praktis, adapun kegunaan penelitian ini ialah sebagai berikut:

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Bagi aspek teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan teori di bidang akuntansi, terutama yang berkaitan dengan faktor-faktor terkait yang dapat mempengaruhi pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi bagi penelitian selanjutnya, khususnya terkait faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah.

1.4.2 Kegunaan Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini memberikan informasi dan pengetahuan kepada peneliti mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pengelolaan keuangan daerah dengan menggunakan gaya kepemimpinan sebagai variabel moderasi. Juga berguna sebagai sarana bagi peneliti menerapkan ilmu dan pengetahuan yang diperoleh dari perkuliahan melalui objek penelitian secara langsung.

b. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pihak-pihak yang berperan dalam pengelolaan keuangan berupa informasi mengenai pengaruh



transparansi, akuntabilitas dan partisipasi terhadap pengelolaan keuangan dengan gaya kepemimpinan sebagai variabel moderasi.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini mencakup pengaruh transparansi, akuntabilitas dan partisipasi terhadap pengelolaan keuangan dengan gaya kepemimpinan sebagai variabel moderasi. Dengan kata lain, ruang lingkup penelitian ini hanya menguji dan menganalisis pengaruh variabel transparansi, akuntabilitas dan partisipasi terhadap pengelolaan keuangan dengan gaya kepemimpinan sebagai variabel moderasi dalam lingkup Kantor Pemerintah Kota Makassar.

1.6 Sistematika Penelitian

Buku pedoman penulisan tesis dan disertasi fakultas ekonomi dan bisnis Universitas Hasanuddin tahun 2013 merupakan acuan yang digunakan dalam penulisan tesis ini. Adapun pedomannya adalah sebagai berikut.

Bab I pendahuluan, bab ini memberikan informasi kepada pembaca mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, kegunaan, ruang lingkup, dan diakhiri dengan sistematika penulisan tesis.

Bab II tinjauan pustaka, bab ini menguraikan teori-teori dan konsep yang menjadi fondasi dalam penelitian. Selain itu, bab ini juga menguraikan penelitian terdahulu yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan.

Bab III kerangka pemikiran dan hipotesis, bab ini berisi kajian teoretis dan empiris yang dirumuskan secara logis dan digambarkan dalam suatu kerangka pemikiran.

pemikiran selanjutnya menjadi dasar untuk membangun kerangka konseptual ggambarkan hubungan antara konsep yang diteliti.



Bab IV metode penelitian, bab ini berisi rancangan penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, variabel penelitian dan definisi operasional, instrumen penelitian dan teknik analisis data.

Bab V hasil penelitian, bab ini menguraikan deskripsi data dan deskripsi hasil penelitian. Penyajian hasil penelitian memuat deskripsi tentang data dan temuan penelitian berupa narasi yang disertai analisis statistik, pengujian hipotesis, tabel, grafik, dan gambar.

Bab VI pembahasan, tujuan pembahasan adalah menjawab pertanyaan penelitian atau rumusan masalah, menafsirkan temuan-temuan, mengintegrasikan hasil dan temuan pada ilmu atau teori yang telah mapan, memodifikasi teori yang ada atau menyusun teori baru.

Bab VII penutup, bab ini berisi tentang kesimpulan, implikasi, keterbatasan penelitian, dan saran. Bab penutup dapat menjadi pedoman bagi peneliti selanjutnya yang ingin melanjutkan penelitian serupa.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori dan Konsep

2.1.1 Teori *Stewardship*

Pada Teori *Stewardship* oleh (Donaldson & Davis, 1991) menjelaskan bahwa pengelola modal (*Steward*) termotivasi untuk menjalankan sesuai tujuan prinsipal. Teori ini didasarkan pada filosofi bahwa sifat manusia hakikatnya dapat dipercaya, bertanggungjawab, serta memiliki sifat kejujuran yang tinggi (Ramadhan, 2022). Sehingga manajemen sebagai steward tidak akan menjalankan hal-hal yang lebih mementingkan kepentingan pribadi, namun lebih kepada kepentingan organisasi (Mauliya & Ratmono, 2023). *Steward* cenderung selalu mementingkan kepentingan organisasi meskipun hal tersebut tidak sesuai dengan prinsipnya. *Steward* merasa bahwa ketika menjalankan kepentingan organisasi dan mengikuti perintah principles merupakan tindakan rasional. *Steward* juga mendapatkan kepuasan apabila memperoleh kepercayaan publik, sehingga teori *Stewardship* ini sangat cocok digunakan pada organisasi sektor publik (Mirza, 2020). Inti dari teori ini terletak pada cara manajer atau pemimpin organisasi berperan sebagai pengelola (*Steward*) yang bertanggung jawab atas pemeliharaan dan peningkatan kekayaan perusahaan. Teori ini menekankan pentingnya terbangunnya kepercayaan antara pemilik perusahaan dan manajer, fokus pada kekayaan bersama, manajemen risiko dan pengambilan keputusan yang bertanggungjawab, pertanggungjawaban dan transparansi, keberlanjutan dan manajemen jangka panjang, serta keterlibatan pemilik

egang saham. Dengan teori *Stewardship*, diharapkan bahwa organisasi dapat keberhasilan jangka panjang melalui minimalkan konflik, terbangunnya



kepercayaan, dan pengelolaan yang efektif dari sumber daya dan aset perusahaan (Madiistriyatno, 2021).

2.1.2 Pengelolaan Keuangan

Pengelolaan keuangan adalah proses manajemen yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan fungsi tanggung jawab pada implementasi penyediaan uang dan penggunaan uang dalam organisasi untuk mencapai tujuan organisasi (Haq & Muzakki, 2023). Menurut pasal 1 ayat 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan daerah menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah dituntut untuk tertib, transparan dan akuntan guna mewujudkan pemerintahan yang bersih.

Pengelolaan Keuangan dalam penelitian ini berkaitan dengan kesanggupan pegawai dalam pengelolaan keuangan yang akan dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan kepada publik secara benar, jujur, dan tidak diskriminatif. Pemerintah daerah harus mampu mengelola keuangan dengan baik, keuangan daerah harus dikelola secara tertib, efisien, efektif, transparan, dan bertanggungjawab (Gusti *et al.*, 2022). Selain itu, Keuangan daerah juga harus dikelola sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, serta Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah.

Penelitian ini indikator pengukuran pengelolaan keuangan daerah mengacu pada Permendagri Nomor 19 Tahun 2020. Beberapa dimensi pengelolaan daerah berdasarkan Permendagri Nomor 19 Tahun 2020 adalah: 1) kesesuaian dokumen perencanaan dan pelaksanaan, 2) kualitas anggaran belanja dalam APBD, 3) Transparansi pengelolaan



keuangan daerah, 4) penyerapan anggaran, 5) kondisi keuangan daerah, 6) Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

2.1.3 Transpirasi

Transparansi adalah suatu prinsip yang menjamin akses informasi atau kebebasan bagi setiap orang untuk mengetahui tentang penyelenggaraan pemerintah baik informasi mengenai kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai (Fadjar Trisakti *et al.*, 2022). Menurut (Pebriana Marlinda *et al.*, 2024) Transparansi juga berarti adanya penjelasan manajemen organisasi sektor publik tentang aktivitas, program dan kebijakan yang sudah, sedang dan akan dilakukan beserta sumber daya yang digunakannya.

Standar Akuntansi Pemerintah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, menjelaskan bahwa transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayanya dan ketaaannya pada peraturan perundang-undangan. Transparansi berarti dalam menjalankan pengelolaan keuangan, pemerintah mengungkapkan hal-hal yang bersifat material secara berkala kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan untuk itu, dalam hal ini yaitu masyarakat luas (Fadjar *et al.*, 2022).

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa transparansi berarti aspek keterbukaan bagi semua pihak yang berkepentingan untuk mengetahui dan mengawasi sumber daya yang dikeola oleh pemerintah. Transparansi merupakan salah satu prinsip good governance, sehingga pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan informasi

kap dan kemudahan untuk akses, karena informasi tersebut digunakan untuk lan keputusan pihak yang berkepentingan. Dalam peneiltian ini indikator untuk



mengidentifikasi transparansi mengacu pada (Herlina, 2020), dimana indikator transparansi terdiri dari: 1) Ketersediaan dan aksesibilitas dokumen, 2) kejelasan dan kelengkapan informasi, 3) keterbukaan proses, dan 4) kerangka regulasi yang menjamin transparansi.

2.1.4 Partisipasi

Partisipasi termasuk dalam perwujudan *Good Governance*. Menurut (Resky, 2021) partisipasi ialah keterlibatan seseorang dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi. Partisipasi adalah wujud dari keikutsertaan dan keterlibatan. Menurut (Rusni, 2021) partisipasi sebenarnya berasal dari Bahasa Inggris yaitu dari kata *Participation* yang berarti suatu kegiatan untuk membangkitkan perasaan dan diikuti sertakan atau ambil bagian dalam kegiatan suatu organisasi.

Partisipasi anggaran adalah metode penganggaran di mana manajer tingkat bawah terlibat dalam proses penganggaran (Rahmawati & Supriatono, 2019). Keterlibatan yang dimaksud antara lain adalah ikut serta memberikan pendapat, pertimbangan, dan rekomendasi kepada pimpinan dibawahnya untuk menyusun dan merevisi anggaran. Menurut (Anggadini & Qurni, 2020) partisipasi anggaran merupakan sistem anggaran yang memungkinkan manajer tingkat bawah atau manajer fungsional ikut serta dalam proses pembuatan target anggaran dan bertanggung jawab dalam pencapaian target anggaran tersebut. Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa partisipasi anggaran adalah suatu metode penganggaran yang melibatkan secara aktif manajer tingkat bawah dalam seluruh proses penganggaran. Adapun indikator partisipasi anggaran yang digunakan pada penelitian ini yaitu indikator menurut (Kiswoyo *et al.*, 2021), (a) keterlibatan, (b) pengaruh, (c) komitmen.



2.1.5 Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan salah satu aspek dari *Good Governance*. Akuntabilitas ialah bentuk dari tanggungjawab agent atau pengelola secara administratif atas pengelolaan keuangan daerah. Dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 menjelaskan bahwa pengelola wajib memberikan laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah, selain itu juga sebagai wujud pengendalian agar pengelola tetap berjalan sesuai dengan kebijakan dan dapat mencapai tujuan organisasi. Akuntabilitas adalah kinerja aparatur pemerintah dari perencanaan hingga pengawasan segala aktivitas yang dikerjakan dengan dibiayai dengan anggaran wajib dipertanggungjawabkan kepada yang berkepentingan (Muhajir, 2019).

Menurut (Machfiroh, 2019) akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Hampir diseluruh instansi dan lembaga-lembaga pemerintah berusaha menekankan konsep akuntabilitas dalam menjalankan administrasi pemerintahan. Berdasarkan beberapa uraian diatas dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas adalah pertanggungjawaban pihak pemerintah daerah atas pengelolaan keuangan daerah kepada masyarakat. Dalam organisasi pemerintah akuntabilitas publik adalah pemberian informasi terhadap kinerja finansial pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut. Menurut (Mareta & Fakhri, 2024), dimensi akuntabilitas ada 5 yaitu:

1. Akuntabilitas hukum dan kejujuran (*Accountability For Probity And Legality*)

Akuntabilitas hukum terkait dengan dilakukannya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang diisyaratkan dalam organisasi, sedangkan akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan, korupsi dan kolusi.

Akuntabilitas hukum menjamin ditegakkannya supremasi hukum, sedangkan akuntabilitas

an menjamin adanya praktik organisasi yang sehat.

Akuntabilitas Manajerial



Akuntabilitas manajerial yang dapat juga diartikan sebagai akuntabilitas kinerja (*Performance Accountability*) adalah pertanggungjawaban untuk melakukan pengelolaan organisasi secara efektif dan efisien.

3. Akuntabilitas Program

Akuntabilitas program juga berarti bahwa program-program organisasi hendaknya merupakan program yang bermutu dan mendukung strategi dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi. Lembaga publik harus mempertanggung jawabkan program yang telah dibuat sampai pada pelaksanaan program.

4. Akuntabilitas Kebijakan

Lembaga-lembaga publik hendaknya dapat mempertanggung jawabkan kebijakan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan dampak dimasa depan. Dalam membuat kebijakan harus dipertimbangkan apa tujuan kebijakan tersebut, mengapa kebijakan itu dilakukan.

5. Akuntabilitas finansial

Akuntabilitas ini merupakan pertanggungjawaban lembaga lembaga publik untuk menggunakan dana publik (*Public Money*) secara ekonomis, efisien dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana, serta korupsi. Akuntabilitas finansial ini sangat penting karena menjadi sorotan utama masyarakat. Akuntabilitas ini mengharuskan lembaga-lembaga publik untuk membuat laporan keuangan untuk menggambarkan kinerja finansial organisasi kepada pihak luar. Dari pendapat tersebut ada beberapa dimensi akuntabilitas yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu pertanggungjawaban hukum kepala daerah, pertanggungjawaban kinerja, pertanggungjawaban program, pertanggung jawaban kebijakan dan pertanggungjawaban oleh tim pelaksana atas pengelolaan keuangan daerah.



2.1.6 Gaya Kepemimpinan

Wattimena & Latuheru, (2020) menyatakan bahwa gaya kepemimpinan adalah proses atau model yang diterapkan oleh seorang pemimpin dalam mensugesti bawahannya untuk melakukan perintahnya. Pemimpin yang efektif harus mampu mengendalikan bawahannya dengan selalu mengandalkan daya tarik mereka dalam menyampaikan pesan-pesan sehingga dapat diterima dengan baik oleh bawahannya. Gaya kepemimpinan juga berkaitan dengan hubungan antara bawahan dengan pimpinannya dalam suatu organisasi. Apabila seorang pemimpin mampu memberikan arahan yang baik terhadap bawahannya maka tujuan organisasi akan mudah dicapai.

Menurut Mushaddiq & Rony, (2023) gaya kepemimpinan adalah cara yang digunakan memimpin dan memengaruhi para pengikutnya. Gaya kepemimpinan merupakan suatu pola perilaku seorang pemimpin yang khas pada saat memngaruhi anak buah. Dengan kata lain, cara pemimpin bertindak dalam mempengaruhi anggota kelompok membentuk gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan yang selama ini deteorikan lebih mengarah bagaimana para pemimpin mampu mempengaruhi para pengikut agar dengan sukarela mau melakukan berbagai tindakan bersama yang diperintahkan oleh pemimpin tanpa merasa bahwa dirinya di tekan dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

Gaya kepemimpinan yang efektif adah gaya kepemimpinan yang mampu menggerakkan pegawai untuk bekerja dengan efisien dan efektif, sehingga setiap karyawan dapat mencapai tujuan organisasi. Peran seorang pemimpin sangat penting untuk mencapai tujuan organisasi yang diinginkan. Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah atau dalam konteks pemerintahan gaya kepimpinan sangat penting dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan yang mengacu pada prinsip good governance.

(Suryantoro, 2022) indikator untuk mengukur gaya kepemimpinan yaitu an, komunikasi, pengambilan keputusan, dan motivasi.



2.2 Tinjauan Empiris

Tinjauan empiris merupakan kajian yang diperoleh dari berbagai penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh peneliti lain. Beberapa peneliti yang telah melakukan kajian mengenai pengaruh transparansi, akuntabilitas dan partisipasi terhadap pengelolaan keuangan dengan gaya kepemimpinan sebagai variabel moderasi dipaparkan sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

NO	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	(Hamsinar, 2017) Pengaruh Partisipasi, Akuntabilitas, Transparansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Kab. Pinrang)	Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi, Sistem Pengendalian Magang (moderator)	Transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi berpengaruh positif signifikan; sistem pengendalian internal memoderasi akuntabilitas dan transparansi.
2	(Masitha & Mulyadi, 2024) Transparansi Keuangan Daerah dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan (Sulawesi Tenggara)	Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi	Transparansi meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi pengelolaan keuangan serta mendorong partisipasi masyarakat.
3	(Kharismayanti <i>et al.</i> , 2018) Pengaruh Gaya Kepemimpinan terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Kab. Badung)	Gaya Kepemimpinan (moderator), Sistem Administrasi Keuangan, Sarana/Prasarana, Kompetensi Pegawai	Gaya kepemimpinan memoderasi pengaruh sistem administrasi dan sarana/prasarana, tetapi tidak memoderasi kompetensi pegawai.
4	(Auditya <i>et al.</i> , 2021) Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah (Universitas Bengkulu)	Akuntabilitas, Transparansi	Akuntabilitas dan transparansi berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah.
5	(Ristiana, 2022) Pengaruh Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat pada Pengelolaan Dana Desa (Rifqi Ma, 2023) Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi dan Kompetensi	Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi, Kompetensi	Akuntabilitas berpengaruh positif signifikan; partisipasi masyarakat tidak berpengaruh signifikan secara parsial. Semua variabel berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan desa.



	terhadap Pengelolaan Keuangan Desa		
7	(Kusuma Astuti, 2023) Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Anggaran dan Sistem Pengendalian Internal	Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Anggaran, Sistem Pengendalian Internal	Semua variabel berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
8	(Javed <i>et al.</i> , 2024) A stakeholder-centric paradigm bids well for the “business case” - An investigation through moderated-mediation model	<i>Responsible Governance, Corporate Social Responsibility (CSR), Financial Performance, Corporate Reputation, Responsible Leadership Orientation.</i>	<i>Responsible governance</i> meningkatkan kinerja keuangan dan reputasi perusahaan secara signifikan. CSR memediasi pengaruh tata kelola terhadap kinerja dan reputasi, menunjukkan peran strategis CSR sebagai jembatan. Efek moderasi menunjukkan perbedaan orientasi kepemimpinan: Orientasi “economist” dan “opportunity seeker” memperkuat hubungan governance CSR. Orientasi “integrator” dan “idealist” justru memperlemah hubungan tersebut.
9	(Halisa, 2023) Pengaruh Partisipasi, Transparansi dan Akuntabilitas pad Pengelolaan Keuangan Dana Desa (Studi Kasus Kasus Pada Desa)	Transparansi, Akuntabilitas, Pengelolaan Keuangan	Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi Berpengaruh Terhadap Pengelolaan Dana Desa
10	(Albanese <i>et al.</i> , 2021) <i>Transparency, civic capital and political accountability: A virtuous relation?</i>	<i>Civic Capital, Transparency, Political Accountability, Civic Capital.</i>	<i>Civic capital</i> secara signifikan meningkatkan transparansi pemerintahan lokal. Transparansi berdampak positif secara politik bagi pejabat publik hanya ketika <i>civic capital</i> tinggi, karena warga lebih aktif menuntut keterbukaan dan akuntabilitas. Temuan ini konsisten di berbagai sampel dan tetap valid setelah mengatasi



			potensi masalah endogenitas.
--	--	--	------------------------------

